

ANALISIS KELAYAKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEAGRARIAAN DI KABUPATEN PINRANG

Analysis of E-Government Implementation Feasibility of Public Service in Agrarian Field at Pinrang Regency

Juliasti Surdin

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the readiness of the Organization Land Office Pinrang against regulations that support the implementation of e-government (2) determine the readiness of Human Resources at the District Land Office Pinrang apparatus of the knowledge and skills in the implementation of e-government (3) knowing Infrastructure support at the District Land Office Pinrang in terms of hardware and software for e-government implementation. This study was conducted in Pinrang District Land Office, in April to July 2015. The informant is taken apparatus using the CTF application service counter and apparatus part survey, measurement and mapping using ArcGIS software. Data collection method is a questionnaire, interview, observation and documentation. Data were analyzed using simple frequency table. These results indicate that the feasibility of the implementation of e-government at the District Land Office Pinrang not optimal, this is due to the organization of the District Land Office Pinrang not supported by the local government regulation on the implementation of e-government readiness in detail although Human Resources supports and readiness Infrastructure adequate.

Keywords: *e-Government, Organization, Human resources, Infrastructures*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesiapan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap peraturan yang mendukung dalam penerapan e-government (2) mengetahui kesiapan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap pengetahuan dan keterampilan aparat dalam penerapan e-government (3) mengetahui dukungan Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam hal hardware dan software untuk penerapan e-government. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, pada bulan april sampai bulan Juli 2015. Informan yang diambil adalah aparat yang menggunakan aplikasi KKP pada loket pelayanan dan aparat bagian Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang menggunakan software ArcGIS. Metode pengumpulan datanya adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan implementasi e-government pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum optimal, hal ini disebabkan dalam organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum didukung adanya peraturan pemerintah daerah tentang penerapan e-government secara rinci walaupun kesiapan Sumber Daya Manusia sudah mendukung serta kesiapan Infrastruktur telah memadai.

Kata kunci ; *Pengaruh, eksploitasi media, Obama, aktivis mahasiswa*

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam suatu sistem elektronik adalah penggunaan sistem komputer secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data elektronik. Sistem ini adalah suatu sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, prosedur standar, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang mencakup fungsi input, proses, output, penyimpanan dan komunikasi.

Realitas penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan memunculkan istilah e-government yang dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan dan pemerintah di seluruh dunia saat ini dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan mulai meninggalkan pemerintahan tradisional (traditional government) yang identik dengan paper-based administration.

Di Indonesia sendiri sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government telah banyak daerah yang menerapkan e-government dalam pelayanan publik, ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tentunya penerapan e-government bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategis, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping juga adalah guna tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lainnya yang dimungkinkannya, Sosiawan (2010).

Latif Al-Hakim (2007), melihat e-government sebagai pemanfaatan ICT untuk mentransformasi pemerintah menjadi lebih

mudah diakses (accessible), efektif (effective) dan akuntabel (accountable). Transformasi ini mengkombinasi perubahan organisasi dengan keterampilan baru peningkatan pelayanan publik, partisipasi demokratis, dan pembuatan kebijakan publik. E-government memiliki potensi untuk mengubah hubungan antara pemerintah dengan publik. Dampak e-government tergantung bukan hanya pada teknologi, tetapi sumberdaya organisasi dan visi strategik.

Sependapat dengan hal tersebut, Hasrullah (2014), mengatakan transparansi dan akuntabel, dua kata itu merupakan atribut kunci yang wajib dimiliki pemerintah saat ini. Dua atribut yang mengarah pada good governance, sebuah credo penyelenggaraan pemerintahan yang telah dikenal sejak awal 1990-an.

Dengan adanya e-government sesuai pemahaman diatas, maka aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, semakin besarnya tuntutan demokratisasi, dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat agar pemerintah daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional.

Beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil menerapkan e-government adalah:

Kabupaten Jembrana (Provinsi Bali) melalui penerapan J-Card dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa tengah, melalui Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak tahun 2003. Kedua kabupaten di atas, merupakan potret keberhasilan daerah memanfaatkan e-government dalam menggunakan TIK sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria cepat, tepat dan memuaskan masyarakat.

Beberapa kendala terhadap penerapan e-government diberbagai daerah diantaranya:

Pertama, peraturan seputar e-government yang cenderung masih lemah. Kedua, belum adanya pemahaman yang tepat mengenai esensi e-government dikarenakan lemahnya sisi Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga, problem ketersediaan infrastruktur, akses telekomunikasi

sebagai hal pokok yang harus dimiliki bagi penerapan e-government belum sepenuhnya ada.

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) Tahun 2013 tingkat Sulawesi Selatan untuk kategori kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai salah satu ciri pemerintahan yang baik dimana salah satu indikator penilaiannya adalah penerapan e-government. (<http://infopublik.org/read/63359/-pinrang-peringkat-i-penilaian-cban-tingkat-sulsel.html>).

Untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang pertanahan harus bergerak maju dan berinovasi dalam mengemban tugas yang diamanatkan konstitusi. Salah satunya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membangun sistem manajemen data dan pengamanan data di bidang pertanahan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan menugaskan BPN membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan meliputi: Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, e-commerce dan e-payment” (pasal 1b poin2).

Pembangunan sistem komputerisasi layanan pertanahan dimulai pada tahun 1997, dilaksanakan secara bertahap dan mulai dikembangkan secara besar-besaran sejak tahun 2002, dimulai dengan penggunaan basisdata spasial, meskipun masih terpisah dengan basisdata tekstual serta mulai dilakukan konversi data spasial. Untuk perangkat lunak, BPN RI sudah mempersiapkan cetak biru TIK yang memungkinkan tersimpannya data teknis pelayanan secara terdistribusi di media penyimpan masing-masing Kantor Pertanahan menjadi data yang tersentral dan tersimpan secara on-line di Pusat Data Pertanahan BPN RI.

Berbagai penghargaan telah diterima BPN RI dalam mengikuti perkembangan trend positif E-Manajemen. Tahun 2008, Presiden RI memberikan Piagam Pelopor Inovasi Citra Pelayanan Prima kepada 11 pimpinan instansi pemerintah. Penghargaan lain diberikan oleh

lembaga independen WARTA EKONOMI yang menyelenggarakan “WARTA EKONOMI e-GOVERNMENT AWARD 2009”, BPN RI di nyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan implementasi e-Government terbaik. Penghargaan terbaru yang diterima BPN-RI adalah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun fenomena yang terjadi, masyarakat sering mengeluhkan pelayanan pertanahan yang buruk dengan masih ditemukan pelaksanaan pelayanan yang belum optimal dalam mewujudkan reformasi birokrasi dalam tubuh Badan Pertanahan Nasional. Selain itu juga, persoalan pelayanan lainnya masih sering dijumpai dalam proses layanan di kantor pertanahan seperti pelayanan yang berbelit-belit atau njelimet. Masih kurangnya integritas aparat pelayanan yang ditandai dengan masih banyaknya aparat yang menerima gratifikasi yaitu tambahan biaya di luar ketentuan/biaya resmi sebagai tanda rasa terima-kasih dari pengguna jasa dianggap sesuatu yang wajar, bukan tergolong korupsi serta keberadaan calo layanan sertipikat tanah masih marak dilingkungan Instansi BPN, juga banyak ditemui makelar-makelar kasus (markus). Keberadaan calo dan markus ini membuat layanan pertanahan menjadi lebih mahal dan kadang menambah alur prosedur.

Beberapa contoh implementasi e-government dalam pelayanan pertanahan yaitu:

Pertama, Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dimana dengan system ini maka tidak ada lagi pelayanan permohonan sertipikat hak atas tanah secara manual, proses permohonan sertipikat hak atas tanah dapat dimonitoring melalui komputer, proses permohonan sertipikat dapat dilakukan secara tertib dan berurutan (first in first out), serta terbentuknya database pertanahan yang selalu up to date.

Kedua, Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Berbasis Pemetaan dan Geografi adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi dengan bantuan komputer yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa- peristiwa yang terjadi di muka

bumi. Ketiga, Website yang merupakan media informasi online lainnya adalah website resmi BPN RI, dengan alamat portal : <http://www.bpn.go.id>. Melalui website ini disediakan berbagai fitur serta informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPN RI, fitur layanan; layanan informasi; biaya layanan beserta simulasinya, serta informasi tentang berkas permohonan (<http://www.bpn.go.id>, 2014).

Seiring dengan pelaksanaan e-government di bidang pertanahan, BPN saat ini menghadapi berbagai masalah (empirical problem) yaitu:

1. Kendala system informasi dan infrastruktur pertanahan (masalah internal). Kendala teknologi antara lain di bidang survey pengukuran dan pemetaan pertanahan yang terdiri dari kegiatan pembuatan peta dasar, peta tematik, peta potensi tanah serta pemanfaatan teknologi terkini. Diperlukan infrastruktur data spasial yang dapat menunjang seluruh program strategis pertanahan (<http://www.bpn.go.id>, 2014).

2. Banyaknya kasus pertanahan yang melibatkan masyarakat, pihak swasta dan instansi pemerintah (masalah eksternal). Jumlah sengketa dan konflik pertanahan (SKP) tahun 2012 sebanyak 7.196 kasus (<http://www.bpn.go.id>, 2014).

Permasalahan di atas perlu dilakukan pembenahan atau penyempurnaan sehingga penerapan e-government dapat lebih optimal terhadap perbaikan pelayanan publik di bidang Pertanahan.

Pengertian Teknologi Informasi & Komunikasi dalam Konteks Ilmu Komunikasi

Teknologi Informasi bisa didefinisikan seperti yang dicantumkan Dictionary of Information Technology yang menyebutkan bahwa Teknologi Informasi merupakan:

“The acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by a microelectronics-based combination of computing and telecommunications ...” Longley & Shain (1985).

Sedangkan Munir (2008), mengemukakan bahwa Teknologi komunikasi adalah perangkat-

perangkat teknologi yang terdiri dari hardware, software, proses dan sistem, yang digunakan untuk membantu proses komunikasi, yang bertujuan agar komunikasi berhasil (komunikatif).

Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komputasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pengertian E-government

E- government di definisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit,2002).

Lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk mendukung pemanfaatan e-government perlu memperhatikan organisasi sebagai lembaga yang memanfaatkan TIK, perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai infrastruktur dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK dan brainware sebagai penggunaan TIK yang digunakan, Sudrajat (2004).

Menurut Indrajit (2002) visi e-government dilandasi pada empat prinsip-prinsip dasar e-government, yaitu:

1. Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas:

a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia.

b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

c) Memungkinkan terjadinya kerjasama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi.

2. Membangun lingkungan yang kompetitif, dimana sektor swasta maupun LSM dapat berperan dalam pelayanan publik. Bahkan sektor swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.

3. Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.

4. Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan e-government

Dalam konsep e-government, Indrajit (2002) dikenal empat jenis klasifikasi di antaranya yaitu:

- Government to citizen (G-To-C).

Tipe G-To-C merupakan aplikasi e-government yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menetapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat.

- Government to business (G-To-B).

Tipe G-To-B merupakan aplikasi e-government yang digunakan untuk memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif.

- Government to government (G-To-G).

Tipe G-To-G merupakan aplikasi e-government yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses politik maupun mekanisme hubungan social dan budaya.

- Government to employees (G-to-E).

Tipe G-To-E merupakan aplikasi e-government yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

Pelayanan Publik

Merujuk pada Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan Administrasi Pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi peraturan, penggunaan, penguasaan dan pemilik tanah, pengukuran hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden, Ali Achmad Chomzah (2003).

Konsep Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu pesat juga telah merambah ke berbagai sektor termasuk pertanahan, sehingga diharapkan dengan pemanfaatan e-government dalam bidang pertanahan harus mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi dalam birokrasi sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan proses pembangunan.

Kelayakan Penerapan E-government dalam Kelembagaan

Pemahaman e-government yang dikemukakan oleh kelembagaan pemerintah memberikan pemahaman bahwa kelembagaan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

Sumber Daya Manusia

Kompetensi SDM TI berkaitan erat dengan inovasi teknologi. Beberapa pakar penelitian pengukuran inovasi teknologi telah menerapkan beberapa indikator untuk mengukur system inovasi teknologi. Beberapa indikator yang telah digunakan yaitu kemampuan daya saing SDM; kemampuan transfer pengetahuan; serta tingkat aktivitas teknologi yang dapat dilakukan. Sehingga indikator tersebut juga dapat ditetapkan untuk pengukuran kompetensi SDM TI.

Menurut Sudarman (2007), bahwa kompetensi dasar standar (standard core competency) yang harus dimiliki oleh semua kategori lapangan pekerjaan tersebut yaitu kemampuan mengoperasikan perangkat keras dan mengakses internet.

Infrastruktur TIK

Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan elemen penting di dalam penerapan e-government karena merupakan tools di dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak mungkin suatu pemerintahan secara elektronik tercipta. Menurut Kusnadi (2008), bahwa infrastruktur Teknologi Informasi (TI) adalah sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi system informasi perusahaan yang terperinci dimana infrastruktur TI meliputi hardware dan software.

- Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)
- Geographic Information System (GIS)

Teori Difusi Inovasi

Difusi inovasi adalah adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Everett Rogers mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

Sejalan dengan pendapat Rogers dalam Cangara (2012) mengidentifikasi pengguna inovasi dalam empat tipe, yaitu: 1) Inovator, 2) penerima dini, 3) penerima mayoritas cepat, 4) penerima mayoritas lambat dan 5) laggard maka pentahapan pengembangan e-government dalam lembaga pemerintahan sesuai dengan kategori mayoritas dini dan cepat dimana pada kategori mayoritas awal orang-orang menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi, atau menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau cukup bermanfaat dan pada kategori akhir menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang, tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus lain, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi.

Teori Media Baru

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2011) ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.

Media baru adalah sebuah istilah yang menjelaskan tentang Hubungan Teori dengan komunikasi massa secara berkelanjutan sangat membantu dalam perkembangan teknologi baru dan aplikasinya pada kehidupan nyata.

Kemunculan media baru turut memberikan andil akan perubahan pola komunikasi masyarakat. Media baru, dalam hal ini internet sedikit banyak mempengaruhi cara individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Internet di kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor sebab informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Jadi Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum dapat dilakukan dengan adanya keterbukaan (transparansi) sehingga diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, sebab keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak. Dimana pada akhirnya pelaksanaan e-government adalah merupakan implementasi dari teori media baru.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada tiga permasalahan pokok yang dirumuskan:

1. Bagaimanakah kelayakan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government?
2. Bagaimanakah kelayakan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government?
3. Bagaimanakah kelayakan infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, didasarkan atas pertimbangan bahwa Kantor tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagrariaan dengan pemanfaatan konsep e-government.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dengan jumlah 8 orang yang dalam menyelesaikan tugas. dianggap mengetahui dan menggunakan lebih banyak tentang aplikasi KKP dan software ArcGIS
 aktivis mahasiswa. Jenis dan Sumber Data, yakni Data Primer, dan Data Sekunder. Penelitian ini berfokus pada penerapan e-government melalui aplikasi KKP dan ArcGIS dalam melayani publik. Teknik Pengumpulan Data, yang digunakan teknik gabungan wawancara, kuisisioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data, data-data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi dan analisis persentase dan di bahas dengan menggunakan gap analisis (analisis kesenjangan)

HASIL

1. Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Pinrang dalam Penerapan E-government

Setiap organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, agar tujuan tercapai dengan lebih efektif dan efisien dapat dilakukan melalui usaha dengan kerjasama seluruh anggota organisasi tersebut. Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Berikut hasil rekapitulasi indikator organisasi dan hasil interval persentase yang dicapai dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Komponen Sistem

No	Indikator	Persentase
1	Dukungan Pemerintah Pusat	87,5
2	Dukungan Pemerintah Daerah	32,4
3	Dukungan Keppres RI No.34 Tahun 2003	90
	Nilai rata-rata interval	69,9

Jika melihat hasil rekapitulasi di atas, maka untuk komponen sistem organisasi interval persentase yang diraih masuk dalam kategori baik. Yang dimaksud kategori baik adalah apabila pelaksanaan e-government di Indonesia telah di dukung oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur secara rinci melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 di ikuti Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 serta keluarnya Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan namun tidak di ikuti dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Pinrang.

2. Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan e-government dalam jajaran BPN yang perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan peralatan IT untuk mendukung pelaksanaan tupoksi dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Berikut hasil rekapitulasi pada indikator sumber daya manusia untuk menentukan interval persentase yang diperoleh dapat di lihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Komponen Sistem SDM

No	Indikator	Persentase
1	Pemahaman pegawai	72,5
2	Kemampuan pegawai	72,5
3	Keterampilan pegawai	72,5
4	Perhatian Kepala Kantor	80
5	Ketersediaan SDM dengan volume kerja	50
	Nilai rata-rata interval	69,5

Dengan melihat rekapitulasi di atas, maka untuk indikator Sumber Daya Manusia interval persentase yang diperoleh masuk dalam kategori baik. Yang dimaksud kategori baik adalah apabila target yang dicapai hanya mencapai sampai pada tahap 80%.

3. Infrastruktur Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap Ketersediaan Hardware dan Software

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebuah organisasi sangatlah menunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang yang mendukung penerapan e-government antara lain yaitu:

- Hardware (perangkat keras) seperti personal komputer dan printer.
- Software (perangkat lunak) seperti KKP dan ArvGis
- Jaringan komunikasi seperti LAN, WAN, dan Internet
- Saluran layanan informasi baik melalui web atau telepon.

Berikut ini hasil rekapitulasi untuk indikator Infrastruktur untuk menentukan interval persentase yang dicapai dapat di lihat dari tabel 3 dibawah:

Tabel 3. Rekapitulasi Komponen Sistem Infrastruktur

No	Indikator	Persentase
1	Infrastruktur	57,5
2	Hardware	47,5
3	Software	62,5
	Nilai rata-rata interval	55,83

Berdasarkan nilai rekapitulasi yang diperoleh, maka untuk indikator infrastruktur interval persentasenya masuk dalam kategori cukup baik. Yang dimaksud kategori cukup baik adalah apabila komponen system infrastruktur sudah di dukung oleh semua sub indikator baik dalam hal hardware dan software namun kondisi dari infrastruktur tersebut sebagian dalam kondisi yang rusak ringan sampai berat sehingga tidak dapat digunakan

Selanjutnya hasil rekapitulasi dari ketiga indikator dari komponen system implementasi e-government pada pelayanan publik di bidang keagrariaan di Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Rekapitulasi Komponen Sistem

No	Komponen Sistem	Persentase
1	Organisasi	69,9
2	Sumber Daya Manusia	69,5
3	Infrastruktur	55,8
	Nilai rata-rata persen	65,07

Dari tabel di atas mengungkapkan bahwa kelayakan implementasi e-government dalam pelayanan publik di bidang keagrariaan di kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori baik. Kategori baik menandakan bahwa komponen system yang menjadi standar kelayakan implementasi e-government pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sudah mendukung.

PEMBAHASAN

1. Kelayakan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam Penerapan E-government

Kelembagaan berkaitan dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengembangan e-government. Di Indonesia inisiatif ke arah e-government telah diperkenalkan sejak Tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan Teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government merupakan langkah serius pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi, tidak bisa dipungkiri menjadi angin segar bagi penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintahan.

Namun, di dalam perkembangannya, penerapan e-government di Kabupaten Pinrang ini menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik disebabkan tidak sedikit SKPD yang ada di Kabupaten Pinrang yang apatis terhadap adanya e-government ditambah lagi berbagai permasalahan di dalam

penerapan e-government di Kabupaten Pinrang antara lain belum adanya peraturan daerah yang secara rinci mengatur tentang penerapan e-government di Kabupaten Pinrang. Peraturan perundang-undangan merupakan landasan normatif yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sebagai sumber kewenangan yang harus diimbangi oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, tanggal 31 Mei 2003 adalah salah satu Kebijakan Pemerintah dalam era Otonomi Daerah. Keppres ini merupakan pelaksanaan prinsip pasal 2, 4 dan 5 ayat (1) Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan konsepsi, kebijakan dan system pertanahan nasional yang utuh dan terpadu sehingga pengelolaan pertanahan benar-benar dapat menjadi sumber bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2001), menyatakan “Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.” Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Jadi kesiapan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan berhasil bilamana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak cukup memadai. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh

Davis (1996), sumber- sumber yang dimaksud adalah:

- Staf yang relative cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan
- Informasi yang memadai dan relevan untuk keperluan implementasi
- Dukungan dari lingkungan organisasi untuk mensukseskan implementasi
- Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan
- Fasilitas-fasilitas lain (seperti gedung, peralatan, tanah dan perlengkapan)

Sehingga gap atau kesenjangan dalam organisasi Kantor Pertanahan akan penerapan e-government masih ada, sebab dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa walaupun organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah didukung dengan keluarnya Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan adanya dukungan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 namun penerapan e-government di Kabupaten Pinrang belum didukung dengan adanya peraturan daerah yang secara rinci mengatur tentang penerapan e-government .

2. *Kelayakan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam Penerapan E-government*

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan e-government. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintahan yang akan menjadi pemain utama atau subyek di dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi Dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat informasi technology literacy sumber daya manusia di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan konsep e-government, Indrajit (2009).

SDM yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi salah satu penghambat penerapan e-government karena membangun system e-government membutuhkan keterampilan berkomunikasi yang cepat, efektif dan simpatik baik dalam penyajian informasi maupun dalam menjawab masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat.

Sumber daya pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berjumlah 34, tak satupun berlatar belakang pendidikan informatika komputer, sebagian dari mereka berlatar belakang pendidikan diploma lulusan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan sarjana Hukum bagi yang berlatar belakang pendidikan S1. Namun walaupun demikian sebagai langkah yang strategis pada awal pengembangan e-government telah disiapkan beberapa SDM pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis komputer baik yang diselenggarakan di daerah maupun di tingkat pusat.

Faktor SDM tidak hanya terkait dengan keterampilan teknis saja tetapi juga pandangan (mindset), sikap dan budaya (kultur) di organisasi tempat ia bekerja. Bagaimana menumbuhkan pandangan dan sikap yang sesuai serta bagaimana membangun budaya organisasi yang selaras merupakan hal yang masih perlu untuk dikembangkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang agar dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan pengetahuan dan ide-ide baru sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu manajemen pengetahuan melalui proses pembelajaran organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sangat diperlukan dalam mengelola dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki organisasi.

Hal ini sesuai dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Samuelson (2004), untuk mendukung pengembangan infrastruktur IT dengan sendirinya menentukan perencanaan SDM, yang direkrut menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada perencanaan yang telah dibuat.

Berikut aspek-aspek kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menuju staf paripurna berdasarkan kompetensi:

- Pengetahuan

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang staf dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan tugas dan bidang pekerjaannya.

- Keterampilan

Merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki seorang staf. Sebagai contoh, staf memiliki keterampilan pengarsipan dan pengoperasian teknologi pendukung.

- Sikap

Merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Seorang staf dituntut untuk bersikap positif terhadap pekerjaan dan lingkungan pekerjaannya.

- Nilai-nilai luhur

Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai luhur, diantaranya:

- a. etika, sebagai prinsip dasar.
- b. integritas atau harga diri.
- c. tanggung jawab.
- d. taat hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. hormat terhadap hak-hak orang lain.
- f. tekad untuk bekerja lebih baik dan bekerja sesuai dengan tugas.

Jadi kemampuan dan keterampilan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam menggunakan peralatan IT sudah baik sehingga gap atau kesenjangan antara standar kemampuan dan keterampilan pegawai dalam menggunakan peralatan IT dengan hasil pengamatan menunjukkan tidak ada kesenjangan namun peningkatan kualitas sumber daya aparat pertanahan yang tertuang dalam visi dan misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dapat terwujud maka masih perlu di berikan pelatihan atau bimbingan secara bertahap dan kontinyu sebab perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi setiap harinya sangat pesat.

3. Dukungan Infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam Hal Hardware dan Software Untuk Penerapan E-government

Sebagai salah satu faktor yang berpengaruh maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai haruslah menjadi perhatian pemerintah yang ingin menerapkan e-government dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang secara bertahap terus meningkatkan

ketersediaan dan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

A. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan di bidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN RI, mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space/storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN RI di bidang Teknologi informatika atau komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal Winoto (2005).

Beberapa keuntungan dalam pelaksanaan KKP antara lain:

1. Transparansi pelayanan, karena masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dalam hal biaya, waktu pelaksanaan dan kepastian penyelesaian.
2. Efisiensi waktu, prinsip one captured multi used merupakan kunci utama dalam optimalisasi pemanfaatan database elektronik.
3. Kualitas data dapat diandalkan karena pemberian nomor-nomor Daftar Isian dilakukan oleh sistem secara otomatis.
4. Sistem Informasi Eksekutif yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk dapat memperoleh dan menganalisa data sehingga menghasilkan informasi yang terintegrasi.
5. Pertukaran data dalam rangka membangun pelayanan pemerintah secara terpadu (one stop services) dan mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis data spasial (spatial planning).

Proses layanan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) kabupaten Pinrang terdiri dari 4 tahap. **Tahap pertama**, layanan KKP dimulai dari pendaftaran. System ini terhubung ke semua unit yaitu: front office dan back office. Front office adalah loket pelayanan yang melayani langsung pemohon, menerima berkas dan pembayaran, serta memberi nomor registrasi secara elektronik. Saat ini terdapat 4 loket pelayanan (loket 1,2,3 dan 4) di Kantor

Pertanahan kabupaten Pinrang. **Tahap kedua**, setelah itu, berkas yang masuk ke loket dinyatakan lengkap, maka akan diteruskan ke setiap seksi yang berkaitan atau back office, misalnya Seksi survey, pengukuran dan Pemetaan yang menangani permohonan untuk pengukuran tanah. Di kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terdapat 5 seksi pelayanan. Berkas-berkas tersebut akan diselesaikan oleh setiap seksi sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan. **Tahap ketiga**, berkas-berkas yang diselesaikan oleh setiap seksi diontrol secara elektronik sesuai Standar Operating Procedure (SOP) misalnya waktu penyelesaian berkas. Aplikasi KKP harus sejalan dengan SOP, jika semua berjalan dengan lancar maka selanjutnya masuk ke **tahap empat** yaitu tahap penyerahan produk. Setelah berkas selesai, pemohon akan menerima kembali berkasnya di loket penyerahan produk yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Sejak Mei Tahun 2013 aplikasi KKP yang digunakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah beralih dari KKPdekstop menjadi KKPWeb. Aplikasi KKPWeb adalah system yang akan memberikan standarisasi pelayanan data yang terintegrasi dan manajemen dokumen serta arsip dan merupakan pengembangan dari aplikasi KPPdekstop.

B. Geographic Information System (GIS)

GIS secara umum yaitu :

“sebagai suatu system berbasis computer untuk menangkap (capture), menyimpan (store), memanggil kembali (retrieve), menganalisis, dan mendisplay data spasial, sehingga efektif dalam menangani permasalahan yang kompleks baik untuk kepentingan penelitian, perencanaan, pelaporan maupun untuk pengelolaan sumber daya dan lingkungan” Star and Ester (1990)

Oleh karena cukup kompleksnya teknologi GIS, maka perlu dilihat beberapa pendekatan baik dari segi aplikasinya maupun pengembangannya. Burrough and McDonnell (1998) mencatat empat pendekatan yang biasa digunakan:

- Pendekatan database menekankan kemampuan system dalam menangani struktur data pokok dari data geografik yang kompleks.
- Pendekatan process-oriented terfokus pada urutan dari elemen-elemen system yang

digunakan oleh seorang analis saat menjalankan suatu aplikasi.

- Pendekatan application-oriented membatasi suatu GIS berdasarkan jenis-jenis analis informasi termasuk penggunaan dari informasi yang diproduksi dari system tersebut
- Pendekatan toolbox menekankan komponen-komponen perangkat lunak dan cara kerja yang harus dimiliki oleh suatu GIS, termasuk penyediaan perangkat system dalam bentuk user interface.

Pada Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, pembuatan peta dengan menggunakan GIS dilakukan melalui proses atau tahap-tahapan pemetaan sebagai berikut:

a) Tahap pencarian dan pengumpulan data

Ada beberapa cara dalam mencari dan mengumpulkan data, yaitu:

- Secara langsung

Cara pencarian data secara langsung dapat melalui metode konvensional yaitu meninjau secara langsung ke lapangan dimana daerah tersebut akan dijadikan objek dari peta yang dibuat. Cara ini disebut dengan teristris. Dengan cara ini dilakukan pengukuran medan menggunakan theodolit, GPS, dan alat lain yang diperlukan serta pengamatan informasi ataupun wawancara dengan penduduk setempat secara langsung sehingga didapat data yang nantinya akan diolah.

Dapat pula dilakukan secara fotogrametri, yaitu dengan metode foto udara yang dilakukan dengan memotret kenampakan alam dari atas dengan bantuan pesawat dengan jalur khusus menurut bidang objek. Atau dapat pula menggunakan citra dari satelit serta cara-cara lain yang dapat digunakan.

- Secara tak langsung

Melalui cara ini tentu saja kita tidak usah repot-repot meninjau langsung ke lapangan melainkan kita hanya mencari data dari peta atau data-data yang sudah ada sebelumnya.

Data yang diperoleh dari pencarian data secara tak langsung ini disebut dengan data sekunder, sedangkan peta yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta lain disebut sebagai peta dasar.

b) Tahap pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan merupakan data spasial yang tersebar dalam keruangan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dikelompokkan misalnya data kualitatif dan data kuantitatif, kemudian data kuantitatif dilakukan perhitungan yang lebih rinci. Langkah selanjutnya yaitu pemberian simbol atau simbolisasi terhadap data-data yang ada.

c) Tahap penyajian dan penggambaran data

Tahap ini merupakan tahap pembuatan peta dari data yang telah diolah dan dilukiskan pada media. Dalam tahap ini dapat digunakan cara manual dengan menggunakan alat-alat yang fungsional, namun cara ini sangat membutuhkan perhitungan dan ketelitian yang tinggi agar didapat hasil yang baik.

Akan lebih baik jika digunakan teknik digital melalui komputer, penggambaran peta dapat digunakan aplikasi-aplikasi pembuatan peta yang mendukung, misalnya ARC View, ARC Info, AutoCAD Map, Map Info, dan software lain. Setelah peta tergambar pada komputer, kemudian data yang telah disimbolisasi dalam bentuk digital dimasukkan dalam peta yang telah di gambar pada komputer, pemberian informasi tepi, yang kemudian dilakukan proses printing atau pencetakan peta.

d) Tahap penggunaan data

Tahap ini sangatlah penting dalam pembuatan sebuah peta, karena dalam tahap ini menentukan baik atau tidaknya sebuah peta, berhasil atau tidaknya pembuatan sebuah peta. Dalam tahap ini pembuat peta diuji apakah petanya dapat dimengerti oleh pengguna atau malah susah dalam dimaknai. Peta yang baik tentunya peta yang dapat dengan mudah dimengerti dan dicerna maksud peta oleh pengguna. Selain itu, pengguna dapat memberikan respon misalnya tanggapan, kritik, dan saran agar peta tersebut dapat disempurnakan sehingga terjadi timbal balik antara pembuat peta (map maker) dengan pengguna peta (map user).

Terkait dengan adanya penggunaan GIS, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Maka pada wilayah Kabupaten dibuat Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang yang merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Kabupaten/Kota

Pinrang dan jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten, Rencana Pola Ruang terdiri atas rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya dan Kawasan Strategis Nasional yang terkait dengan wilayah Kabupaten Pinrang dimaksud adalah KSN dari sudut kepentingan ekonomi berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesiapan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government telah didukung adanya peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, kemudian diikuti keluarnya kebijakan di Bidang Pertanahan namun belum di dukung dari Pemerintah Daerah yang mengatur secara rinci penerapan e-government di Kabupaten Pinrang.
2. Kesiapan Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government sudah mendukung sebab aparat telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam menggunakan peralatan IT .
3. Kesiapan Infrastruktur Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam penerapan e-government sudah memadai dengan tersedianya hardware dan software yang mendukung.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Hakim Latif. 2007. *Global E-government: Theory, Applications and benchmarking*. Idea Group Inc: USA

Burrough. 1998. *Principles of Geographical Information System*. Oxford University Press Inc: New York

Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi kedua. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Chomzah, Ali Achmad, 2004, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*. Prestasi Pustakaraya: Jakarta

Davis, Gordone. 1996. *Sistem Informasi Management*. LPM:Bandung.

Hasrullah. 2014. *Kritik Adalah Anugerah*. Reso Communications: Makassar

Indrajit. 2002. *Electronic government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital)*. Andi: Yogyakarta

Indrajit. 2009. *E-government In Action . Ragam Kasus Implementasi di Berbagai Belahan Dunia*. Andi: Yogyakarta

Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Budi Aksara: Jakarta

Kriyantono. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada Media Group. Jakarta

Kusnadi. 2008. *Ilmu Komputer dengan sistem operasi unggulan*. Informatika: Bandung

Longley, Dennis; Shain, Michael (1985), *Dictionary of Information Technology* (ed. 2), Macmillan Press, hlm. 164, ISBN 0-333-37260-3

McQuail Dennis. 1996. *Teori Komunikasi Massa*. Diterjemahkan oleh Agus dan Aminuddin. Erlangga: Jakarta

Moenir. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta

Mc Quail. 1996. *Teori Komunikasi Massa*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Erlangga: Jakarta

Noor, H.F. 2008. *Ekonomi Manajerial*. Rajawali Pers: Jakarta

Sudrajat. 2004. *Ilmu Komunikasi (Konsep dan Teori)*. Rajawali Press: Jakarta

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 2004. *Ilmu Makroekonomi*. Edisi Ketujuhbelas. PT. Media Global Edukasi: Jakarta

Star and Ester. 1990. *Geographic Information System : An Introduction*. Prentice hall: Englewood Cliff.

Sosiawan, Edwi Arief. 2010. *Evaluasi Implementasi E-government Pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia*. Paper Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran. Yogyakarta

Sudarman. 2008. *Menulis di Media Massa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Republik Indonesia. 2011. *Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial*. Sekretaris Negara: Jakarta

Winoto, J. 2005. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya*. Makalah Seminar “Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi” (Institut Pertanian Bogor). Jakarta

<http://infopublik.org/read/63359/-pinrang-peringkat-i-penilaian-cban-tingkat-sulsel.html>.
<http://www.bpn.go.id>, 2014